

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dipisahkan menjadi wilayah besar dan kecil, dalam wilayah kecil yang terdiri dari kecamatan dan kelurahan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerapan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan pedesaan dan perkotaan lebih seimbang.<sup>1</sup> Terciptanya pemerataan pembangunan terutama di daerah-daerah kecil mendorong keterlibatan aktif pemerintah sebagai fasilitator dengan mendorong pelaksanaan otonomi pemerintah.<sup>2</sup> Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.<sup>3</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah semakin membuka peluang peran masyarakat dan upaya pemberdayaan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat diyakini sebagai pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, yang direncanakan serta dilaksanakan oleh

---

<sup>1</sup> Lina Nasihatun Nafidah, “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemebrdayaan Masyarakat”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2015), h. 214.

<sup>2</sup> Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafind Indonesia, 2003), h. 5.

<sup>3</sup> Dewi Hasniati Buton, R.Siti Mardiaty Narjilah, Erik, “Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 No.3, (2019), h. 2.

masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Kelurahan Kedaleman merupakan bagian dari Kecamatan Cibeber yang berhu bungan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks ini, kelurahan mempunyai makna yang sangat berhubungan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan publik, memfasilitasi pemenuhan hak serta kebutuhan masyarakat setempat dalam hal pembangunan.<sup>5</sup> Program pembangunan yang dilakukan kelurahan merupakan salah satu penjabaran nyata dari visi dan misi yang telah dibuat, khususnya dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan evaluasi dan review terhadap rencana kerja prioritas dan realisasi kegiatan tahun sebelumnya melalui proses musyawarah kelurahan.

Program Pokmas adalah salah satu implementasi sebagai perwujudan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang mengamanatkan kepada pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran 5% dari APBD dikurangi DAK kepada kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan di kelurahan. Selain itu, sebagai pelaksanaan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagai kewenangan walikota kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah, pemerintah daerah menginisiasi program dana pembangunan wilayah kelurahan bersumber dari APBD yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2015, untuk anggaran tahun 2022 telah diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota tahun 2021 tentang penetapan alokasi pagu dana pedoman

---

<sup>4</sup> Ahmad Sururi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.3 No.2, h. 2.

<sup>5</sup> Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*, (Bandung:CV. Indra Prahasta 2014), h. 312.

umum dana pembangunan wilayah kelurahan untuk Kelurahan Kota Cilegon.

Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran dana DPWKel di Kelurahan Kedaleman perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan. Mengingat pengawasan merupakan suatu cara pengendalian untuk mencegah adanya ketimpangan kebocoran serta penyimpangan dalam penggunaan dana kelurahan. Pengawasan anggaran dana sumbernya bukanlah sesuatu yang harus dilakukan akan tetapi apabila pengawasan dapat dikelola dengan baik maka hal itu akan mendorong dalam pembangunan. Tujuan pengawasan anggaran dana merupakan suatu alat kontrol yang perlu dilakukan agar dengan demikian pelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan demikian program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, saya tertarik dengan adanya program yang dilaksanakan di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeer Kota Cilegon dalam mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **PERAN POKMAS (KELOMPOK MASYARAKAT) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA PEBANGUNAN WILAYAH**

---

<sup>66</sup> Ekasary Paradenti, “ Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD)”, *Jurnal Holistik*, No.20, 2017, h.3.

## **KELURAHAN (DPWKEL)” (Studi Kasus di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kelompok Masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan di Kelurahan Kedaleman ?
2. Apa saja tahapan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Kedaleman ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kedaleman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berawal dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tahapan Pokmas dalam melaksanakan program pembangunan di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran Pokmas di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dalam pemberdayaan pembangunan
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program Pokmas dalam pembangunan di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yaitu :

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi pedoman untuk studi banding lebih lanjut dan akan menjadi persembahan pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan studi yang mengarah pada pengetahuan perencanaan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

##### 2. Manfaat Praktis sebuah.

###### a. Untuk Peneliti

Agar peneliti dapat memberikan pengalaman melalui proposal ini, sehingga kedepannya memiliki referensi untuk penulisan yang lebih baik.

###### b. Untuk Masyarakat

Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh, bahwa Pokmas memiliki peran yang baik dalam pembangunan, sehingga pemberdayaan pun akan melekat kuat pada masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sebagai bahan perbandingan, dan bahan kajian dalam penulisan proposal ini. Adapun yang digunakan terdiri dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan:

*Pertama*, skripsi yang telah disusun oleh Reza Nur Faisyiah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020 berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Usaha *Home Industry* Keripik Kentang di Desa Penanggungan Kecamatan Wanayasa Kabupaten

Banjarnegara”. Dalam skripsi ini penulis memakai metode penelitian kualitatif, penulis memperoleh hasil yaitu dan pemberdayaan memiliki pengaruh yang sangat terkait dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Perbedaan dari peneliti ini terdapat pada tempat penelitian, objek penelitian, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Nur Faissyah objek yang diambil adalah home industri keripik kentang, sedangkan dalam penelitian ini kelompok masyarakat dalam pengembangan. Dan persamaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian ialah mengenai pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Erniyati dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2010 berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMK) di Desa Semper Barat, Jakarta Utara”. Dalam skripsi ini penulis memakai teknik penelitian kualitatif. Peneliti memperoleh hasil yaitu pemberdayaan masyarakat melalui PPMK sebagai media investasi dan membekali masyarakat dengan komputer untuk hidup mandiri. Perbedaan dari peneliti ini terdapat pada tempat penelitian, objek penelitian, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Erniyati objek yang diambil adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMK) sedangkan dalam penelitian ini kelompok masyarakat dalam pembangunan. Dalam penelitiannya Erniyati juga membahas tentang strategi pemberdayaan, sedangkan penulis ini menjelaskan peran dan tahapan dalam program

---

<sup>7</sup> Reza Nur Faissyah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha *Home Industry* Kripik Kentang di Desa Penaggungan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara”, (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020)

Pokmas. Kesamaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu tentang pemberdayaan dan strategi pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Ayu Purnama Wulandari dari Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Buluh Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”. Dalam skripsi ini, penulis memakai teknik penelitian kualitatif. Penulis mendapatkan hasil yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Buluh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa tahapan seperti perencanaan dengan memberikan contoh dan praktek langsung cara pembuatannya sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Perbedaan dari peneliti ini terdapat pada tempat penelitian, objek penelitian, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Purnama Wulandari objek yang diambil adalah Pelatihan Pembuatan Sapu Alang-alang, sedangkan dalam penelitian ini peningkatan kualitas pembinaan melalui peran dari kelompok masyarakat. Kesamaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian ialah tentang pemberdayaan dan proses pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Erniyati, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK ) di Kelurahan Semper Barat”, (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010)

<sup>9</sup> Ayu Purnami Wulandari, “Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta 2014)

## F. Kerangka Teoretis

### 1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>10</sup>

Peran merupakan sesuatu yang diperbuat, sesuatu yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran adalah keseharian perilaku yang melekat pada diri seseorang dikarenakan menduduki posisi tertentu dalam suatu peristiwa sosial.<sup>11</sup> Peran tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, karena yang satu bergantung pada yang lain begitupun sebaliknya. Seseorang dikatakan berperan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan posisinya. Peran dapat menentukan kedudukan sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai

---

<sup>10</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Forence Daicy J.Lengkong dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, h. 2.

<sup>11</sup> Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 100



dengan kedudukan dalam bermasyarakat di lingkungannya. Jadi seseorang menduduki suatu posisi di dalam masyarakat kemudian menjalankan posisinya dengan suatu peran.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero peran pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan seni rupa-rupa yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka yang digolongkan menjadi 4 golongan yaitu :<sup>12</sup>

a) Peran fasilitatif

Terkait dengan peran kelompok masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam meningkatkan potensi masyarakat. Serta bagaimana kelompok masyarakat membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun sarana lingkungan warga.

b) Peran edukasional

Terkait dengan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, peningkatan lingkungan yang nyaman dan bersih dapat mengembangkan potensi bakat anak sehingga nantinya anak-anak akan mendapatkan pendidikan non formal melalui kegiatan sarana lingkungan warga.

c) Peran teknis

Mengacu pada kemampuan pengurus kelompok masyarakat dan masyarakat dalam melakukan pengumpulan dan analisis masalah lingkungan masyarakat serta kemampuan

---

<sup>12</sup> Theresia Baturangka, J.E. Kaawoan dan Frans Singkoh, “ Peran Dinas Sosial dalam Pemembrdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.3*, 2019, h.4.

secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pelaksanaan dan penjagaan.

Di sisi lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan di masyarakat. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran juga di dalam bahasa Indonesia diartikan; yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran juga ialah suatu bentuk perbuatan yang berpengaruh pada suatu peristiwa. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hal dan kewajibannya. Artinya, apabila ada seseorang yang sedang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran, yakni:<sup>13</sup>

- a. Peran meliputi nilai-nilai yang berkaitan dengan posisi, jabatan, atau tempat dalam suatu masyarakat
- b. Peran merupakan tindakan perihal apa yang dapat atau dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat

Menurut Soeharto peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>14</sup> Berdasarkan kutipan diatas penulis menyimpulkan peran rangkaian tindakan atau perlakuan nyata yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi atau kedudukan dengan tujuan tertentu. Analisis terhadap perilaku peranan

---

<sup>13</sup> Dafiyanto S. S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), h. 487

<sup>14</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Forence Daicy J.Lengkong dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah....., h.2.

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

## 2. Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>15</sup> Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penerbitan pemeliharaan pengaturan serta sistematisa sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat.

---

<sup>15</sup> Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh dan Welly Waworundeng, “Manajemen Pengelolaan dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Governance*, Vol.1 No.2, 2021, h. 3

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Geroge R. Terry ahapan-tahapannya yaitu :<sup>16</sup>

a. Tahap perencanaan

Perencanaan ialah fungsi dari pada mananger di dalam pemilihan pemilihan alternatif, tujuan-tujuan kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program. Dalam tahap perencanaan mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip pembantu tercapainya tujuan. Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditunjukkan kepada pencapaian tujuan
2. Prinsip efisiensi daripada perencanaan. Suatu perencanaan adalah efisiensi bilamana perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang kecil-kecilnya
3. Prinsip pengutamakan perencanaan. Perencanaan merupakan keperluan utama daripada manajer fungsi lainnya ialah organizing, staffing, directing dan control.
4. Manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama daripada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tergantung pada terhadap tercapainya tujuan oleh karena itu apabila

tujuan tidak tercapai mungkin disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan.

b. Pengorganisasian

Setelah merencanakan mereka selanjutnya melakukan pengorganisasian artinya perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

c. Pelaksanaan atau penggerak

Penggerak ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar bisa berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidak seluruh anggota kelompok mulai dari tingkat atas, menengah dan bawah. Segala kegiatan itu harus terarah kepada sarannya, mengingat kegiatan yang tidak pada sasaran hanyalah sebuah pemborosan saja terhadap tenaga kerja, uang dan waktu.

d. Pengawasan

Pengawasan menurut G,R Terry diartikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan perbaikan, pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan berlatih suatu proses atau suatu langkah penentuan yang ingin didapatkan artinya di sini meninjau hal-hal yang apa yang kurang dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai sehingga dinilai yang perlu ditinjau.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “*empowerment*” yang berasal dari akar kata “*empower*” yang berarti *to invest with power, especially legal power or officially authority*. Pemberdayaan memiliki peran yang relevan dalam pembangunan. Ia berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang lemah. Pemberdayaan dapat mempersiapkan sumber daya, pengetahuan, peluang, dan keahlian bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas dalam masyarakat, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya memberdayakan untuk berperilaku ke arah yang lebih baik secara bertahap dapat menjadi lebih baik.<sup>17</sup>

#### **Unsur Utama Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan:**

Strategi Dasar Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa strategi dasar yang menjadi acuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Strategi pada dasarnya memiliki 3 arah, yaitu<sup>18</sup>:

- a. Mendukung serta memberdayakan masyarakat
- b. Penguatan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan
- c. Modernisasi melalui penajaman serta penguatan perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber dari partisipasi masyarakat lokal.
- d. Kebijakan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>17</sup> Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah 2019), h. 17.

<sup>18</sup> Gunawan Sumodiningrat, “Jaringan Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 14 No. 3*, (1999), h. 12.

### **Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dikonseptualisasikan sebagai upaya yang memberikan tenaga, kekuatan, kemampuan dan cara untuk mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan dikonseptualisasikan dalam 2 perihal pokok, ialah<sup>19</sup>:

- a. Peningkatan kapasitas warga melalui implementasi bermacam kebijakan kapasitas yang diinginkan
- b. Tingkatkan kemandirian warga dengan memberikan kewenangan yang sepadan kepada warga dalam mengambil keputusan guna membangun diri serta lingkungannya secara mandiri.

### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Mardikanto dan Poerwoko menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi bermacam upaya peningkatan, antara lain:

- a. Peningkatan pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai cara untuk meningkatkan pendidikan menjadi lebih baik, tidak hanya sebatas memperbaiki materi, memperbaiki metode, perbaikan waktu dan tempat, serta hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat, tetapi bagaimana meningkatkan pendidikan non formal dalam pemberdayaan. Proses yang mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa memandang waktu dan usia.

- a. Peningkatan aksesibilitas (*better accesibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang masa, diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas.

---

<sup>19</sup> PrioTri Isyanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan BUM DESA di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang", (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 12.

b. Tindakan yang lebih baik (*better action*)

Melalui penyediaan pendidikan yang lebih baik dan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya (SDM), sumber daya alam dan sumber daya lainnya/buatan, diharapkan akan muncul tindakan yang lebih baik.

c. Peningkatan kelembagaan (*better instution*)

Dengan melakukan perbaikan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan masyarakat, khususnya pengembangan jaringan kemitraan usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar yang kuat di masyarakat.

d. Peningkatan bisnis (*better busines*)

Dengan peningkatan semangat belajar, peningkatan kegiatan, kelembagaan dan aksesibilitas diharapkan mampu meningkatkan usaha/usaha yang dijalankan.

e. Peningkatan pendapatan (*better income*)

Diharapkan perbaikan usaha yang dilakukan mampu meningkatkan pendapatan mereka, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Peningkatan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau keterbatasan pendapatan.

g. Hidup lebih baik (*better living*)

Artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat dapat meningkatkan taraf hidup setiap keluarga dan masyarakat.



h. Peningkatan masyarakat (*better community*)

Artinya, situasi kehidupan yang lebih baik dan didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.<sup>20</sup>

**Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Pendekatan Kesejahteraan adalah sistem pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada kelompok tertentu.
- b. Pendekatan Pembangunan ialah bentuk pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kemandirian masyarakat dengan memfokuskan kegiatannya pada pembangunan proyek-proyek pembangunan.
- c. Pendekatan Pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat yang berupaya memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya dengan melihat sebab dan akibat di dalamnya.<sup>21</sup>

**Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut teori Isbandi Rukminto tahapan-tahapan dalam memberdayakan masyarakat terbagi menjadi 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahap Pengkajian (assessment)

Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat.

---

<sup>20</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makkasar: De La Macca, 2018), h. 13-14.

<sup>21</sup> Zubaidi. *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 90.

Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap Perencanaan

Program Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan

Program Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan

sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu yang pendek biasanya membentk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka Panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.<sup>22</sup>

#### 4. Kelompok Masyarakat

Kelompok adalah himpunan manusia yang hidup bersama dan berhubungan satu sama lain. Kelompok terdiri dari dua orang atau lebih yang tujuannya saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan menurut Gitosaputro, masyarakat adalah himpunan manusia yang menepati dalam suatu tempat geografis tertentu, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya. Sehingga kelompok masyarakat adalah himpunan dari beberapa orang yang bertugas menyelenggarakan suatu kegiatan. Di antara definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sekelompok masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama, sehingga ada hubungan di antara mereka.

#### **Peran Kelompok Masyarakat**

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab secara teknis serta administratif dalam pelaksanaan program

---

<sup>22</sup> Isbandi Rukminto, Kesejahteraan Sosial, (Depok : PT Raja Grafindo Indonesia, 2015), h. 206

- b. Membuat serta menyiapkan proposal rencana teknis kegiatan yang akan dilakukan bersama konsultan perencana
- c. Sosialisasi program
- d. Mengumpulkan potensi lembaga swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
- e. Pembuatan rekening bersama dengan ketua RW
- f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
- g. Mendampingi dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
- h. Pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana untuk dibuatkan laporan termin.
- i. Mengawasi perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada ketua kelompok masyarakat dan camat.<sup>23</sup>

## 5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan yang memberikan kesempatan pada masyarakat agar bisa memecahkan masalah dan mencari solusi. Wasistiono mengatakan dengan menjadikan masyarakat sebagai fokus pembangunan, pemberdayaan partisipasi masyarakat dapat menciptakan kemandirian. Maka pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah cara yang dibutuhkan saat ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat yang lemah dalam pembangunan. Pemberdayaan sebenarnya diarahkan pada bagaimana masyarakat mampu

---

<sup>23</sup> Syania Al Kautzar, "Hubungan Peranan Pengurus Kelompok Masyarakat (pokmas) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Regamsaimangiwawa", (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2016), h. 12.

mandiri, mengontrol kehidupannya sehingga dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan.<sup>24</sup>

### **Bentuk Partisipasi Masyarakat yang Diharapkan dalam Pembangunan**

Menurut Ndraha, bentuk partisipasi masyarakat, jika dilihat dari proses pembangunan mulai dari ide hingga bentuknya, partisipasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Partisipasi Prosesi adalah partisipasi yang dilakukan selama proses berlangsung
- b. Partisipasi parsial adalah partisipasi yang hanya dilakukan dalam satu atau beberapa tahapan

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.**

- a. Tahap *Assessment*

Dilakukan dengan masyarakat yang terlibat aktif melalui permasalahan yang terjadi dengan mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dimiliki.

- b. Tahap *Alternative Program*

Program hal ini dilakukan dengan merumuskan permasalahan yang dihadapi dan merumuskan cara penanggulangannya dengan mengadakan beberapa program yang melibatkan masyarakat.

- c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah bagian terbesar dari program. Dalam hal ini, pelaksanaan program yang akan melibatkan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Khairul Rahman, "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol.II No.1, (2016), h. 192.

d. Tahap evaluasi

Adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program-program yang telah dilakukan.<sup>25</sup>

Sedangkan partisipasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Keikutsertaan dalam perencanaan yaitu pelibatan masyarakat oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses pembangunan yang akan dilakukan pada tiap daerahnya
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional yaitu keterlibatan nyata masyarakat dalam pelaksanaan operasional program pembangunan yang dilaksanakannya
- c. Partisipasi dalam menerima hasil yaitu partisipasi masyarakat agar dapat memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dengan baik.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ialah penelitian yang mengkaji guna memahami fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian seperti tindakan, anggapan, motivasi dan sebagainya. Dengan metode ini, peneliti menggunakan cara mendeskripsikan suatu fenomena berupa kata- kata dan bahasa dalam konteks alam yang eksklusif.<sup>27</sup> Penelitian ini akan menggunakan riset lapangan dan secara penulisan menggunakan metode deskriptif (menggunakan data

---

<sup>25</sup> Angelius Henry Sigalingging, "Partisipasi Masyarakat Perencanaan Pembangunan", *Jurnal Administrasi Public, Vol.2 No.2*,(2014), h. 122.

<sup>26</sup> Merry Agustin, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musrenbang", *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, h. 3-4.

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2006), h. 4.

kualitatif) dengan menjelaskan tentang pemberdayaan pengembangan program Pokmas.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal Oktober 2022 - Desember 2022.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data serta data yang cocok dengan permasalahan penelitian ini, penulis berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan memakai instrumen pengumpulan informasi sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara datang ke lokasi (survey), kemudian mengamati serta mencatat proses- proses yang terjadi di objek penelitian. Dengan ini peneliti datang ke lokasi (kelurahan) dan kediaman Ketua Pokmas.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proestanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara langsung yaitu secara lisan dengan bertatap muka dan mendengarkan informasi langsung dari responden karena tanpa wawancara, peneliti dapat kehilangan informasi yang akurat. Selain wawancara langsung, peneliti juga melakukan wawancara tidak langsung yaitu melalui akses internet seperti whatsapp dan telepon. Dalam wawancara ini peneliti memakai metode wawancara semi terstruktur ialah dengan mengajukan sebagian pertanyaan, mencermati dengan seksama, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dengan ini peneliti mewawancarai Kepala Bagian

Pembangunan Kelurahan, Kepala Kotaku, Kepala Pokmas, 3 anggota Kelompok Masyarakat dan beberapa anggota masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang telah dilakukan. Dokumentasi dapat berupa gambar, karya, tulisan hingga rekaman atau video. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa file, foto dan rekaman suara.

4. Analisis Data

Riset ini memakai analisis data kualitatif dengan model *Miles and Huberman*. Analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif serta bersinambung hingga tuntas. Tahapannya merupakan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta pola, dengan begitu informasi yang direduksi dapat membagikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah periset untuk mengumpulkan informasi berikutnya untuk setelah itu dicarinya. Penelitian ini memerlukan informasi tentang keadaan sosial, kegiatan setiap hari serta keadaan sekitar. Hal ini dilakukan supaya peneliti bisa lebih mudah menemukan masalah.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi langkah berikutnya penyajian data. Informasi yang sangat kerap dipakai dalam menyajikan data penelitian kualitatif ialah data berbentuk bacaan naratif. Hal ini hendak membuatnya lebih mudah guna memahami apa yang hendak terjadi.



c. Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif bagi Miles dan Huberman ialah memberikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bertabiat sementara, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah jika tidak ditemui fakta yang kokoh buat menunjang tahap pengumpulan informasi berikutnya. Metode analisis informasi yang digunakan dalam riset ini adalah analisis deskriptif. Informasi yang diperoleh dari objek penelitian berikutnya akan dideskripsikan dalam wujud narasi ilmiah. Kemudian sesudah itu akan diketahui kesimpulan akhir dari riset yang dilakukan oleh periset.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dalam proposal skripsi, diperlukan perancangan pembahasan yang sistematis. Sistematika yang akan dijabarkan yaitu sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penyusunan.

**BAB II** berisi tentang gambaran umum desa dan gambaran umum Kelompok Masyarakat. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, ialah profil kelurahan, identitas kelurahan serta gambaran umum kelompok masyarakat yang meliputi sejarah, tugas Pokmas, fungsi dan struktur kelompok masyarakat.

**BAB III** berisi tentang peran kelompok masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan di Kelurahan Kedaleman Provinsi Banten. Pada bab ini akan dibahas peran Pokmas dalam pemberdayaan masyarakat, program kegiatan, tujuan program, dampak lingkungan dan

perekonomian, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan.

**BAB IV** berisi tentang tahapan pelaksanaan program pokmas di Kelurahan Kedaleman. yang terbagi dalam beberapa sub tahap yaitu tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, manfaat program Pokmas dan implementasi program Pokmas dalam kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

**BAB V** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan oleh penulis dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan. Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran.